



SEJARAH ORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (DARI MASA KOLONIAL HINGGA ORDE BARU)

Moch. Khafidz Fuad Raya

Institut Agama Islam Darullughab Wadda'wah Pasuruan

Email: hafidzraya@yahoo.co.id

Abstrak

Berdasar catatan sejarah memperlihatkan bahwa pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut sejak kedatangan kolonialisme Barat di akhir abad ke-16. *Pesantren* sebagai lembaga pendidikan Islam pertama harus mendapat ujian berat menghadapi pemerintah kolonial yang begitu menekan pesantren, di masa ini pendidikan Islam “dianak tirikan” dengan Sekolah Kolonial yang didirikan oleh pemerintah Belanda; orientasi pendidikan Islam masa kolonial sebagai upaya mobilisasi masyarakat melawan penjajahan kolonial. Sedangkan di zaman Orde Lama, orientasi pendidikan Islam bertujuan mengembalikan lembaga pendidikan Islam atas dominasi dualisme “Sekolah Agama” dengan “Sekolah Umum” dengan dibentuknya madrasah untuk menghapus paradigma masyarakat tentang dikotomi tersebut. Usaha-usaha tersebut kemudian dilanjutkan di masa Orde Baru yang orientasinya untuk menyamakan posisi madrasah dengan sekolah umum melalui berbagai kebijakan penyetaraan, termasuk kebijakan secara konstitusional (perundang-undangan), kebijakan secara kelembagaan dengan “me-Negeri-kan” madrasah swasta dan madrasah yang berada di dalam pesantren secara berkala dan berkelanjutan; serta kebijakan kurikulum pada porsi muatan materi keagamaan dengan materi umum.

Kata Kunci: Orientasi Pendidikan Islam, Kolonial, Orde Lama, Orde Baru.

Pendahuluan

Negara-negara Muslim memiliki sejarah tradisi intelektual pada lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang selama 1400 tahun. Institusi pendidikan di negara-negara Muslim juga telah mengalami perubahan dan tren fluktuasi kemajuan dan kemunduran¹, termasuk di Indonesia. Awal mula lahirnya lembaga

¹ Yahia Baiza, “Islamic Education and Development of Educational Traditions and Institutions,” in *Handbook of Islamic Education*, ed. Holger Daun and Reza Arjmand, International Handbooks

pendidikan Islam di Indonesia ialah *pesantren* yang keberadaan sudah ada di Indonesia antara abad ke 13 – 17 M², terlacak dari pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Maghribi, seorang ‘ulamā’ yang hidup pada abad ke 13 sebelum masa Wali Songo.³ Tercatat bahwa pesantren di Jawa yang pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Maghribi sekitar tahun 1399 M.⁴

Pesantren di Indonesia merupakan bagian dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Indonesia.⁵ Sehingga Nurcholis Madjid (1997) menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unik karena satu-satunya lembaga *indigenous* yaitu lembaga pendidikan Islam asli dari Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain.⁶ Sejarah munculnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami momen yang cukup panjang setelah penjajahan kolonialisme Barat di abad ke-16-an yang berdampak pada lembaga pendidikan Islam. Tidak hanya menjajah Nusantara, tetapi kolonialisme juga memberlakukan hukum sekuler (pemisahan antara agama dan negara) dan pendidikan ala Barat. Akibatnya, perubahan-perubahan ini menghasilkan sejumlah dilema dan tantangan bagi umat Islam selama dan setelah periode kolonial.⁷

Dilema tersebut diungkap oleh Martin van Bruinessen (2008)⁸ dan Noor Farish, et.al. (2008)⁹ bahwa selama periode kolonial, Indonesia secara terpisah

of Religion and Education (Cham: Springer International Publishing, 2018), 77–97, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_7.

² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 6; Alwi Shihab, *Islam Sufistik: "Islam Pertama" Dan Pengaruhnya Hingga Kini Di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2001).

³ Syekh Maulana Malik Maghribi hidup pada abad ke 13 dan wafat sekitar 8 April 1419 M. Lihat dalam Agus Sunyoto, *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah Yang Disingkirkan* (Jakarta: Transpustaka, 2011).

⁴ Ronald Alan Lukens Bull, “A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction” (PhD Thesis, USA, Arizona State University, 1997), 60.

⁵ Gamal Abdul Nasir Zakaria, “Pondok Pesantren: Changes and Its Future,” *Journal of Islamic and Arabic Education* 2, no. 2 (2010): 45–52.

⁶ Nurcholish Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.

⁷ Charlene Tan, “Colonialism, Postcolonialism, Islam, and Education,” in *Handbook of Islamic Education*, ed. Holger Daun and Reza Arjmand, International Handbooks of Religion and Education (Cham: Springer International Publishing, 2018), 177–88, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_22.

⁸ Martin van Bruinessen, “Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia,” in *The Madrasa in Asia*, ed. Martin van Bruinessen, Farish A. Noor, and Yoginder Sikand, Political Activism and Transnational Linkages (Amsterdam University Press, 2008), 217–46, <https://doi.org/10.2307/j.ctt46n10w.12>.

⁹ Farish A. Noor, Martin van Bruinessen, and Yoginder Sikand, *The Madrasa in Asia : Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam University Press, 2008), <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35244>.

memakai 2 (dua) sistem pendidikan, yakni pendidikan sekuler yang diwakili oleh “Sekolah Kolonial” dan pendidikan Islam diwakili oleh “Pesantren”. Bentuk pendidikan Islam paling awal di Indonesia terbentuk dari pesantren yang mengajarkan *Fiqh* (hukum Islam), *Kalām* (teologi), *Tasāwuf* (sufisme), dan tata bahasa Arab (*Lughah*). Sistem pendidikan pesantren ini berlanjut bahkan ketika Belanda mengambil kendali atas penjajahannya di Nusantara pada akhir abad ke-18. Bahkan, dalam banyak kasus pondok pesantren berfungsi sebagai perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Nusantara. Belanda kemudian memperkenalkan sekolah-sekolah kolonial untuk tujuan kolonialisasi, sehingga menimbulkan reaksi keras dari umat Islam pada saat itu dengan menolak sistem sekolah kolonial.¹⁰

Situasi ini berubah pada awal abad ke-20, tahun 1909 ketika sejumlah Muslim progresif mulai mengadopsi sistem sekolah ini dan dibentuknya “madrasah” di kota Padang Sumatera Barat yang disebut *Madrasah Abadiyah* yang memasukkan beberapa mata pelajaran non-agama seperti matematika dan ilmu pasti lainnya selain Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran inti di madrasah. Kemudian muncullah *Madrasah Shcoel* pada 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat yang didirikan oleh Syekh M. Talib Umar. Berturut-turut setelah itu pada tahun 1913 muncul *Madrasah Al Irsyad* di Jakarta yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sokarti. Kemudian pada 1915 muncul *Diniyah Schoel* di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat didirikan oleh Zainuddin Labai el Janusi. Tak ketinggalan pula 2 (dua) ormas besar Islam NU yang mendirikan madrasah-madrasah seperti *Madrasah Awaliyah*, *Madrasah Ibtidaiyah*, *Madrasah Tsanawiyah*, *Mu'allimin Wusta*, dan *Mu'allimin 'Ulyā*; dan Muhammadiyah yang mendirikan perpaduan madrasah dengan sekolah umum seperti *Madrasah Ibtidaiyah*, *Madrasah Tsanawiyah*, *Mu'allimin*, *Muballighin*, dan *Madrasah Diniyah*. Tetapi di sisi lain sebagian besar beberapa pesantren masih mempertahankan sistem pendidikannya sebagaimana meniru praktik sistem pendidikan informal di Mekkah dan Kairo Mesir saat para *kiai* nya lulus dari kedua negara tersebut.¹¹

Melihat sejarah perkembangan pendidikan Islam tersebut dapat diketahui bahwa orientasi-orientasi pendidikan Islam telah mengalami perubahan yang

¹⁰ Hidayatulla Azra, “Islamic Education in Indonesia,” *International Handbooks of Religion and Education* 7, no. 1 (2018): 7.

¹¹ van Bruinessen, “Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia,” 220.

signifikan, dari awal mula lahirnya pesantren sebagai lembaga untuk memahami ajaran agama Islam (*tafaqqah fī al-dīn*)¹² harus berubah orientasinya menyiapkan lulusan disamping menguasai ilmu agama juga dibekali dengan ilmu umum seperti lahirnya madrasah. Apalagi di abad milenium ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Azyumardi Azra pendidikan Islam mengalami pasang surut dan saat ini orientasi paradigmanya ialah menyiapkan lulusan disamping menguasai ilmu agama juga menguasai ilmu-ilmu sains yang bermanfaat bagi peradaban Islam khususnya.¹³ Diberlakukannya desentralisasi pendidikan memberikan arah baru bagi perjalanan orientasi pendidikan Islam. Oleh karena itu perlu disikapi bahwa untuk dapat merubah orientasi pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan zaman, maka diperlukan kajian mendalam tentang akar orientasi pendidikan Islam dari perspektif sejarah agar ditemukan formulasi yang tepat dalam pijakan menyusun kebijakan pendidikan Islam selanjutnya.

Pendidikan Islam di Masa Kolonial

Kedatangan kolonial Belanda ke Nusantara membawa pengaruh terhadap pendidikan Islam di Indonesia, karena 2 tujuan besar mereka yakni *imperiumisasi* dan *misionarisme* untuk menjajah.¹⁴ Terhadap misi misi misionaris, kolonial Belanda tidak suka kepada penduduk pribumi yang beragama Islam sehingga kerap sekali mereka membunuh rakyat jelata yang beragama Islam dan saat belajar agama Islam di surau dan pesantren. Pada masa kolonial, regulasi tentang pembelajaran agama terutama pendidikan Islam diatur secara ketat, misionarisme mereka untuk melancarkan paham sekuler dan agama kristen ke seluruh penjuru tanah air. Hal ini dapat dilihat dari upaya kebijakan Gubernur Djenderal Hindia Belanda Van Den Boss di Bataviapada tahun 1813, yang menetapkan sekolah Agama Kristen di setiap daerah Keresidenan. Usaha misionaris tersebut tetap dilanjutkan sampai tahun 1882, pemerintah colonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas

¹² A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 5–6; Ihsan Harun, “Pondok Pesantren Modern: Politik Pendidikan Islam Dan Problematika Identitas Muslim,” *Jurnal As-Salam* 2, no. 1 (March 31, 2018): 53.

¹³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 28.

¹⁴ Elsbeth Locher-Scholten, “Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago Around 1900 and the Imperialism Debate,” *Journal of Southeast Asian Studies* 25, no. 1 (March 1994): 91–111, <https://doi.org/10.1017/S002246340000669X>.

mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesterraden*.¹⁵

Salah satu bentuk usaha pesantren dalam menyaingi sekolah kolonial adalah dengan memasukkan beberapa item sekolah kolonial ke dalam pesantren, seperti model *halaqah* di pesantren ditambah dengan model unit-unit kelas dengan sarana dan prasarana seperti bangku dan meja ruangan. Namun menurut Maksum (1999) ini hanyalah sebagai salah satu cara memantik minat masyarakat untuk tetap belajar di pesantren, karena pada waktu itu masyarakat sudah mulai terpengaruh cara pandang sekuler pemerintah kolonial mengenai pendidikan Islam.¹⁶

Saat zaman penjajahan Belanda sampai tahun 1965 (walaupun Indonesia sudah merdeka) pendidikan Islam banyak “dikacaukan” oleh sistem pendidikan Belanda yang tujuannya menyamakan kemampuan penduduk pribumi melalui sekolah kolonial. Praktek pendidikan kolonial ini berusaha mendiskriminasi antara anak pejabat dengan anak dari kalangan masyarakat lapisan bawah dan membedakan antara anak priyayi dengan anak pribumi. Masuknya sistem pendidikan kolonial dalam sistem pemerintahan orde lama karena Belanda ingin menciptakan tenaga kerja yang dididik oleh sekolah kolonial untuk menjajah atau mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhirnya lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menjadi institusi paling “kolot” yang hanya berorientasi pada ilmu agama dan mengabaikan ilmu lain. Bisa dikatakan orientasi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda dalam upaya “*survive*” mempertahankan ideologi keagamaan yang dibangun oleh para Waliyullah dan ‘Ulamā’ ditengah gempuran kolonialisme penjajah.

Ketika pemerintah kolonial berkuasa Indoneisa, tampaknya mereka tidak mampu mengendalikan pertumbuhan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Walaupun mereka melakukan segala upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang diskriminatif dan represif terhadap lembaga pendidikan Islam, tetapi tidak membuat pesantren dan madrasah surut atau bahkan terhenti, malah justru lembaga pendidikan Islam dapat eksis sampai di zaman modern sekarang ini.

¹⁵ Hasbullah and Indonesia), *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 52.

¹⁶ Maksum, *Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 93.

Setelah kepergian Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam terkesan “lunak”, karena Jepang tidak menghiraukan urusan agama, yang terpenting bagi Jepang ialah memenangkan perang dan pemuka agama diberi keluasaan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sampai akhirnya Perang Dunia II berlangsung Jepang semakin terjepit yang akhirnya Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Hal ini juga berakibat kepada Pendidikan Islam di Indonesia yang mengalami kemerosotan dan kemunduran karena ketatnya pengaruh indoktrinasi serta *militerisme fascisme* Jepang.¹⁷

Di masa kolonial, wajah pendidikan Islam di Indonesia diwakili oleh “Sekolah Kolonial” sebagai model sistem pendidikan kolonial dan “Pesantren” sebagai model pendidikan Islam. Dualitas pendidikan ini bertahan sampai kemerdekaan Indonesia ketika pendidikan dikelola oleh dua kementerian; yaitu Departemen Pendidikan sebagai payung “Sekolah Belanda”; dan pendidikan Islam berada di bawah naungan Departemen Agama sejak konsepsi pada 1946 hingga sekarang. Namun, Departemen Agama perannya hanya sebagai pengawasan untuk madrasah swasta awal sebagai kontrol pengelolaan pusat. Ada dua tingkatan madrasah yang diawasi mereka adalah Sekolah Rendah Islam atau Madrasah Tingkat Rendah (madrasah rendah) selama empat tahun dan Madrasah Lanjutan selama tiga tahun.¹⁸

Pendidikan Islam di Masa Orde Lama

Di awal kemerdekaan, pendidikan sempat menjadi sorotan fenomenal setelah pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama, Mukti Ali mengubah muatan kurikulum yang semula 100% agama menjadi 70% umum dan 30% agama. Jika dilihat dari perspektif zaman sekarang (modern), tentu saja akan menuai protes keras dari sejumlah ormas Islam yang menghendaki full agama dalam sistem perundang-undangan pendidikan di Indonesia.¹⁹ Namun dalam perspektif di kala itu kebijakan tersebut yang kemudian mengantarkan madrasah setara dengan

¹⁷ Mala Mardiana, “Kontroversi Amandemen Konstitusi Jepang,” *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 3 (July 7, 2018): 214, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1329>.

¹⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah Dan Madrasah* (Jakarta: LP3S, 1986), 91–93.

¹⁹ Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penamadani, 2010), xxv.

sekolah umum, hingga diakui dalam 2 (dua) UU Sisdiknas (UU No. 2 1989 & UU No. 20 2003). Namun dari berbagai sumber catatan sejarah yang peneliti lakukan, dua UU Sisdiknas inilah yang menjadi pemicu protes keras dari kalangan umat Muslim yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Pada masa ini, orientasi pendidikan Islam bisa dikatakan upaya awal dalam “pemisahan” dualitas sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan Islam yang sejak lama membuat bingung rakyat Indonesia.

Namun, pondok pesantren bagaimanapun tetap tidak tersentuh. Pesantren terus mengajarkan mata pelajaran agama Islam secara informal dengan kurikulum tersendiri (tanpa ada campur tangan pemerintah). Kehadiran madrasah tidak berarti menghapus sistem klasikal pesantren yang sudah berjalan ratusan tahun di bumi Nusantara melainkan justru melengkapinya, keduanya berjalan berdampingan walaupun sebenarnya dalam catatan sejarah pertumbuhan pesantren dan madrasah sempat ada rasa “sinis” antara pengelola pesantren dalam hal ini kiai dengan pengelola madrasah dalam hal ini kepala sekolah yang keduanya masih memandang ada pemisahan pendidikan Islam secara institusional kelembagaan oleh pemerintah. Walaupun begitu, pemerintah Orde Lama tetap memperhatikan pendidikan Islam dengan memberikan bantuan materiil kepada lembaga pendidikan Islam melalui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal; 27 Desember 1945, menyebutkan bahwa pesantren dan madrasah adalah salah satu alat untuk mencerdaskan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia. Sampai tahun 1959 pemerintah memutuskan untuk sepenuhnya mendanai madrasah beberapa pesantren.²⁰ Madrasah kemudian dikelola secara terintegrasi seperti sekolah-sekolah pada umumnya, seperti Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Ibtidaiyah), Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Islamiah Muda) dan Madrasah Aliyah (Madrasah Islamiyah Senior).²¹

Atas dasar bantuan yang diberikan pemerintah tersebut, kemudian pemerintah menganjurkan pesantren tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah dengan memasukkan mata pelajaran umum sebagai sampingan dengan tetap menggunakan kurikulum pesantren, sehingga santri di pesantren disamping

²⁰ Anzar Abdullah, “Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru,” *Paramita: Historical Studies Journal* 23, no. 2 (June 1, 2013): 198, <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2673>.

²¹ Azra, “Islamic Education in Indonesia,” 4.

memperoleh ilmu agama juga memperoleh ilmu umum. Namun di kala itu, protes keras tetap menggema yang diwakili oleh kalangan pesantren, yang seolah-olah pesantren akan “dimadrasahkan” oleh pemerintah. Seperti diketahui bahwa pesantren merupakan lembaga mandiri yang tidak mau diatur pengelolaannya oleh orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari Dhofier (1980)²² dan Lukens-Bull (2010)²³ sebagai “kerajaan kecil” yang ada di Indonesia.

Perkembangan pendidikan Islam pada Orde Lama erat kaitannya dengan pendirian lembaga Departemen Agama pertama kali pada 3 Januari 1946 sebagai alat untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Hasilnya lahirlah peraturan tentang pendidikan agama di sekolah umum yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1950 nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 nomor 20 yang berbunyi:

“Pada sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, dan wali murid berhak menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Cara menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah negeri diatur melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK) bersama Menteri Agama”.

Wilayah tugas Departemen Agama disamping mengurus masalah pendidikan agama di madrasah dan pesantren juga di sekolah-sekolah umum dan sekolah keguruan untuk pengajar umum, seperti Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun untuk menjadi guru agama di Sekolah Rakyat (SR) tingkat menengah dan 4 tahun untuk SR di tingkat rendah; Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) selama 2 tahun setelah tamat PGA, untuk menjadi guru agama di SMP (Sekolah Menengah Pertama). SGHA ini dibagi menjadi 4 jurusan: Bagian A (Sastra), Bagian B (Ilmu Pasti)²⁴, Bagian C (Ilmu Agama), dan Bagian D (Ilmu Hukum Agama).²⁵

Steenbrink (1986) mengatakan kedudukan Departemen Agama sebagai tumpuan politis bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang secara

²² Zamakhsyari Dhofier, “The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java,” 1980, <https://doi.org/10.25911/5d74e363a6ded>.

²³ Ronald i I, “Madrasa by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asian Region,” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 4, no. 1 (June 1, 2010): 1–21, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.1-21>.

²⁴ Ilmu pasti ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Sains, seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan lain-lain. Dahulu penyebutannya ilmu pasti karena Sains belum begitu akrab bagi masyarakat Indonesia

²⁵ Abdullah, “Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru,” 199.

kelembagaan yang diakui oleh negara secara intensif mengembangkan program perluasan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Maka pada tahun 1950 pemerintah “meringankan” beban wilayah Departemen Agama dengan membentuk badan Jawatan Pendidikan Agama yang secara khusus mengurus segala sesuatu terkait dengan madrasah, sehingga dapat dikatakan perubahan dan pengembangan madrasah pada Orde Lama tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh badan ini.²⁶

Tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 1960 sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di Perguruan Tinggi Umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan agama atau tidak. Namun pada tahun 1967 (pada awal pemerintahan Orde Baru), ketetapan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama, dan mata kuliah ini masuk dalam kategori penilaian. Bisa dikatakan pada zaman Orde Lama orientasi pendidikan Islam berusaha untuk memperoleh tempat secara konstitusional dalam sistem perundang-undangan, dan akhirnya berhasil.

Pada masa Orde Lama, upaya meningkatkan mutu madrasah dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan status madrasah dari swasta ke negeri, dengan diberi nama seperti MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) dan MAN (Madrasah Aliyah Negeri). Disamping itu pesantren juga diberi kesempatan mengubah status madrasah menjadi negeri, sehingga manajemen pembiayaan pesantren tidak bergantung pada pemasukan dari santri dan donasi dari masyarakat. Namun ada beberapa pesantren yang menolak tawaran mengubah status madrasah menjadi negeri, sebagaimana yang dikemukakan Zamakhsyari Dhofier (1980)²⁷ dan Lukens-Bull (2010)²⁸ bahwa pesantren tidak mau terikat dengan aturan pengelolaan pemerintah karena institusi ini sepenuhnya milik “kiai” sebagai “Raja” dalam “Kerajaan Kecil”nya.

Ternyata anggapan pesantren yang tidak mau menerima tawaran pemerintah tersebut ada benarnya. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Sisdiknas No. 4 Tahun 1950 sebagai UU Sisdiknas pertama pasca kemerdekaan, Departemen Agama menerapkan “Wajib Belajar” kepada seluruh sekolah termasuk madrasah

²⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1986), 79.

²⁷ Dhofier, “The Pesantren Tradition.”

²⁸ i I, “Madrasa by Any Other Name.”

selama 8 tahun dengan tujuan menyiapkan siswa dapat hidup mandiri dan mencari nafkah dalam bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi. Ketetapan tersebut diimplementasikan melalui prosentase muatan agama 25% dan 75% untuk muatan pelajaran pengetahuan umum dan keterampilan.²⁹ Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan menerapkan Wajib Belajar harus terdaftar di Kementerian Agama, dengan syarat madrasah memiliki pelajaran agama Islam paling sedikit 6 jam perminggu.³⁰

Artinya, menurut pesantren yang tidak mau menerima tawaran tersebut beranggapan bahwa pemerintah sudah berlaku tidak adil dalam pembagian muatan materi keagamaan bagi masyarakat. walaupun sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Pendidikan Islam di Masa Orde Baru

Kesungguhan pemerintah Orde Baru mengawal perkembangan pendidikan Islam tersebut diawali dengan dikeluarkannya dalam Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berisi cita-cita Presiden Soekarno mengenai Soko Guru Agama sebagai *leading actor* dalam pembangunan Karakter Bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut maka Departemen Agama diminta berusaha dengan sekuat tenaga untuk memantapkan pendidikan agama di sekolah dan madrasah sampai ke perguruan tinggi.³¹ Walaupun sebenarnya pemerintah masih pemulihan stabilitas nasional pasca pemberontakan PKI tahun 1965. Soko Guru Agama yang dimaksud di atas ialah kesungguhan pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam karena dengan berlandaskan agama yang kuat dan kokoh bangsa Indonesia terhindar dari virus komunisme.

Orientasi pendidikan Islam pada masa ini ditujukan untuk menegerikan madrasah di semua tingkatan (mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah) dengan total 123 level Ibtidaiyah dinegerikan menjadi MIN, 182 level Tsanawiyah menjadi MTsN, dan 42 level Aliyah menjadi MAN.³² Untuk melengkapi kelengkapan

²⁹ Anwar Jasin, "Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis," *AKADEMIKA* 20, no. 01 (1985).

³⁰ Noor, van Bruinessen, and Sikand, *The Madrasa in Asia*.

³¹ Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, 87; Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa*, 99–100.

³² Abdullah, "Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru," 202.

legalitas madrasah secara hukum, maka pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri pada tahun 1975 diantaranya Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri dengan maksud agar ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya, dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang sederajat.³³ Dengan adanya kebijakan tersebut, tidak ada lagi dikotomi antara sekolah umum dengan madrasah.

Pada masa kepemimpinan Munawir Sjadzali tahun 1987, didirikanlah Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang bertujuan mencetak siswa menjadi ‘Ulamā’ muda yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum dengan penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris.³⁴ Menindaklanjuti keputusan tersebut, maka Puslitbang Pendidikan Agama di Departemen Agama bekerjasama dengan Binbaga Islam melakukan studi ke 5 (lima) MAN sebagai penyelenggara program khusus (yaitu MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat, MAN Ujung Pandang, MAN 1 Yogyakarta, MAN Koto Baru Padang Panjang Sumatera Barat). Program MAPK ini mempunyai muatan kurikulum dengan komposisi 70% agama dan 30% umum dengan titik tekan untuk mencetak calon ‘Ulamā’ muda, sehingga siswa “diasramakan” secara intensif dengan bahan ajar dan metode keagamaan dan ditopang oleh penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Memasuki era 90-an, pemerintah Orde Baru merancang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas sebagai pengganti UU Sisdiknas sebelumnya (UU No. 4 tahun 1950 & UU No. 12 tahun 1954), dimana posisi madrasah sama dengan sekolah umum ditegaskan dalam UU ini. Azyumardi Azra (2019)³⁵ memberikan komentar bahwa konsekuensi dari UU No. 2 tahun 1989 menjadikan madrasah sebagai “sekolah umum *plus*” yang berimplikasi pada beban tambahan berupa tambahan materi pelajaran (mapel) dan tambahan waktu belajar di sekolah. Di samping memberikan mapel agama juga harus memberikan mapel umum sebagai bentuk tanggung jawab disamakan dengan sekolah umum; maka

³³ Putra Daulay Haidar, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia,” Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2004, 152.

³⁴ Abdul Rachman Shaleh, “Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Visi, Misi, Dan Aksi,” Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

³⁵ Azra, *Pendidikan Islam*, 136.

secara langsung berakibat pada penambahan alokasi waktu lebih lama daripada sekolah umum, sehingga kadang madrasah lebih lama belajarnya daripada sekolah umum yang berakibat pada tingkat kebosanan siswa.

Upaya penyesuaian dan penyamaan madrasah dengan sekolah umum terus dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengganti Kurikulum 1984 dengan Kurikulum 1994 sebagai bentuk perwujudan UU No. 2 tahun 1989, sehingga MAPK berubah menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan). Bukan hanya perubahan nama saja, tetapi perubahan tersebut berimplikasi pada lahirnya madrasan kejuruan yang lebih ditekankan pada penguasaan ketrampilan khusus terutama di bidang integrasi agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Rupanya orientasi pendidikan Islam pada masa Orde Baru lebih fokus pada arah pengembangan dan peningkatan kualitas madrasah itu sendiri dengan berbagai terobosan kebijakan yang membuat madrasah setara dengan sekolah umum, sehingga paradigam masyarakat Indonesia tidak terdiktomi dalam memandang persoalan “sekolah agama” dengan “sekolah umum”

Kesimpulan

Pertumbuhan Pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut sejak kedatangan penjajah kolonial sampai pada masa Orde Baru. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama harus mendapat ujian berat menghadapi pemerintah kolonial yang begitu menekan keras rakyat yang menempuh studi di pesantren. Saat itu lembaga pendidikan Islam “dianak tirikan” dengan Sekolah Kolonial yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Reaksi keras muncul dari sejumlah masyarakat yang tidak setuju terhadap diskriminasi pendidikan yang dilakukan kolonialisme, sehingga saat itu pesantren menjadi wadah mobilisasi rakyat untuk melawan penjajah. Perkembangan pendidikan Islam melebar setelah pemerintah Orde Lama mendirikan “madrasah” sebagai bentuk sterilisasi pendidikan atas dominasi yang “mendarang daging” di masyarakat tentang dikotomi “Sekolah Agama” dengan “Sekolah Umum”, berbagai upaya dilakukan pemerintah yang orientasinya untuk mengembalikan lembaga pendidikan Islam ke posisi yang sebenarnya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Usaha-usaha tersebut kemudian dilanjutkan di masa Orde Baru yang orientasinya untuk menyamakan posisi madrasah dengan sekolah umum dengan berbagai kebijakan penyetaraan, termasuk kebijakan secara konstitusional (perundang-undangan) tentang pemberlakuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengakui madrasah sebagai bentuk varian lembaga pendidikan di Indonesia; kebijakan secara kelembagaan dengan “me-Negeri-kan” madrasah swasta dan madrasah yang berada di dalam pesantren secara berkala dan berkelanjutan; serta yang terakhir ialah kebijakan kurikulum dengan memberikan porsi muatan materi keagamaan 70% dengan 30% umum pada madrasah khusus bentukan Departemen Agama yakni MAPK (kemudian berubah menjadi MAK) yang merupakan cikal bakal terbentuknya madrasah-madrasah kejuruan yang fokusnya.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Anzar. "Perkembangan Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru." *Paramita: Historical Studies Journal* 23, no. 2 (June 1, 2013). <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2673>.
- Ali, A. Mukti. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Azra, Hidayatulla. "Islamic Education in Indonesia." *International Handbooks of Religion and Education* 7, no. 1 (2018): 763–780.
- Baiza, Yahia. "Islamic Education and Development of Educational Traditions and Institutions." In *Handbook of Islamic Education*, edited by Holger Daun and Reza Arjmand, 77–97. International Handbooks of Religion and Education. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_7.
- Bruinessen, Martin van. "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia." In *The Madrasa in Asia*, edited by Martin van Bruinessen, Farish A. Noor, and Yoginder Sikand, 217–46. Political Activism and Transnational Linkages. Amsterdam University Press, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctt46n10w.12>.
- Dhofier, Zamakhsyari. "The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java," 1980. <https://doi.org/10.25911/5d74e363a6ded>.
- Haidar, Putra Dauly. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia." *Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1*, 2004.
- Harun, Ihsan. "Pondok Pesantren Modern: Politik Pendidikan Islam Dan Problematika Identitas Muslim." *Jurnal As-Salam* 2, no. 1 (March 31, 2018): 53–60.
- Hasbullah, and Indonesia). *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- I, Ronald i. "Madrasa by Any Other Name: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asian Region." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 4, no. 1 (June 1, 2010): 1–21. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.1-21>.
- Jasin, Anwar. "Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis." *AKADEMIKA* 20, no. 01 (1985).
- Locher-Scholten, Elsbeth. "Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago Around 1900 and the Imperialism Debate." *Journal of Southeast Asian Studies* 25, no. 1 (March 1994): 91–111. <https://doi.org/10.1017/S002246340000669X>.
- Lukens Bull, Ronald Alan. "A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction." PhD Thesis, Arizona State University, 1997.
- Majid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Mardiana, Mala. "Kontroversi Amandemen Konstitusi Jepang." *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 3 (July 7, 2018). <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1329>.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Noor, Farish A., Martin van Bruinessen, and Yoginder Sikand. *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam University Press, 2008. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35244>.
- Saridjo, Marwan. *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penamadani, 2010.
- Shaleh, Abdul Rachman. "Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Visi, Misi, Dan Aksi." *Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa*, 2000.
- Shihab, Alwi. *Islam Sufistik: "Islam Pertama" Dan Pengaruhnya Hingga Kini Di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2001.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- . *Pesantren, Sekolah Dan Madrasah*. Jakarta: LP3S, 1986.
- Sunyoto, Agus. *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah Yang Disingkirkan*. Jakarta: Transpustaka, 2011.
- Tan, Charlene. "Colonialism, Postcolonialism, Islam, and Education." In *Handbook of Islamic Education*, edited by Holger Daun and Reza Arjmand, 177–88. International Handbooks of Religion and Education. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_22.
- Zakaria, Gamal Abdul Nasir. "Pondok Pesantren: Changes and Its Future." *Journal of Islamic and Arabic Education* 2, no. 2 (2010): 45–52.